

# MIGRASI PENDUDUK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HANKAM DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR-SERAWAK, MALAYSIA

Sam Arifin\*

## Abstract

*The existence of the border society is part of the indicators of the state sovereignty. In the last 15 years, the amount of the border society in West Kalimantan decreased. This is because of some of them are migrate to Sarawak. The border society migration was conducted through some ways, such as; married, birth, and as a labour. Among these migration patterns, a married and birth are most favourable. Looked from its region, the closest distance to Sarawak are the most migration supplier. And also the lost of economic region tends to supply the migration such as Sanggau, Ketunga Hulu, Aruk and some from Kapuas Hulu. By decreasing the amount of border society, it will influence to the border security. Because they most understand the border sign, illegal streets across the border while the ability of government to prepare army for guarding border is not comparable with the long of border which is reach 2004 km in length.*

**Kata kunci :** Migrasi, Penduduk Perbatasan, Pertahanan dan Keamanan

Eksistensi penduduk di wilayah perbatasan, dalam perspektif hukum internasional merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan kedaulatan negara<sup>1</sup> di garda depan. Namun sayangnya, dalam perkembangan mutakhir, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia, jumlah penduduk di wilayah tersebut semakin berkurang jumlahnya, karena bermigrasi ke Sarawak. Migrasi yang dilakukan oleh penduduk lokal perbatasan tersebut pada umumnya bersifat permanen yang ditandai dengan perpindahan kewarganegaraan mereka.<sup>2</sup>

Berubahnya model migrasi tersebut, yang banyak melibatkan penduduk lokal wilayah perbatasan, dipicu oleh kondisi pembangunan sosial dan ekonomi wilayah perbatasan, yang tidak berimbang dengan kemajuan pembangunan di wilayah Sarawak. Sehingga penduduk wilayah perbatasan Kalbar merasa cemburu dengan kemajuan yang dicapai oleh saudaranya di wilayah Sarawak.<sup>3</sup>

Dalam konteks migrasi temporer yang dilakukan oleh para buruh migran, sebenarnya tidak ada persoalan mendasar yang perlu diperhatikan. Sebab akar masalahnya adalah ketimpangan ekonomi—dan dilihat dari sudut pelakunya adalah penduduk luar perbatasan yang transit di gerbang perbatasan negara. Namun, hal itu akan menimbulkan persoalan serius dalam bidang hankam, ketika dilakukan oleh penduduk lokal perbatasan.

Fenomena tersebut dalam konteks hukum Internasional adalah ancaman serius bagi terjadinya *silent occupation* oleh negara tetangga terhadap wilayah kedaulatan RI.<sup>4</sup> Gejalanya ditandai dengan merebaknya sejumlah temuan kasus bergesernya patok perbatasan negara oleh para TNI penjaga perbatasan. Berdasarkan dokumen Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebutkan, bahwa hingga tahun 2006 tercatat ada 19.328 unit patok batas darat Indonesia-Malaysia. Sebagian besar dalam keadaan hancur dan hilang termasuk usia maupun akibat erosi.

---

Sani Arifin adalah dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran, Gunungpati, Gedung C-4, UNNES. E-mail: sars@staff.unnes.ac.id.

Lihat Malcolm N. Shaw, 1999, *International Law*, Cambridge University Press, New York, USA., hal. 140. Lihat juga Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hal. 106.

Lihat dalam hasil penelitian lengkap yang dilakukan oleh Saru Arifin, 2009, Penanggulangan Migrasi Penduduk Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Menjaga Pertahanan dan Keamanan Wilayah Nkri Melalui Integrasi Kebijakan Keamanan (*Security Approach*) Dengan Kesejahteraan (*Welfare Approach*) Berbasis Sumberdaya Ekonomi Lokal: (Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia).

Lihat Heru Susetyo, 2008, Mengelola Perbatasan Indonesia-Malaysia Dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional, Paper untuk disertakan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah PPI Malaysia tahun 2008.

Steven Y. Pailah, 2007, *Kedaulatan NKRI vs Silent Occupation*, diakses pada tanggal 4 April 2008 dari <http://www.images.google.co.id/imgres?imgurl>

Dampaknya, menurut TNI, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat sebesar 6.403 hektare.<sup>5</sup>

Selain itu, dengan berkurangnya jumlah penduduk perbatasan, maka pengawasan swakarsa oleh masyarakat terhadap para pelintas batas (*cross border*), maupun patok batas wilayah negara tidak bisa dilakukan secara efektif. Sebab, penjagaan yang secara formal dilakukan oleh aparat TNI hanya pada titik-titik tertentu saja, padahal panjang wilayah perbatasan di Kalimantan sangat luas, yakni mencapai 2004 km dari Pulau Sebatik, Kalimantan Timur hingga ke Tanjung Datu, Kalimantan Barat.<sup>6</sup>

### Fenomena Migrasi dalam Perspektif Teori

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.<sup>7</sup>

Migran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam waktu enam bulan atau lebih.<sup>8</sup> Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dari kacamata ekonomi, berbagai teori telah dikembangkan dalam menganalisis fenomena migrasi. Teori yang berorientasi pada ekonomi neoklasik (*neoclassical economics*) misalnya, baik secara makro maupun mikro, lebih menitikberatkan pada perbedaan upah dan kondisi kerja antardaerah atau antarnegara, serta biaya, dalam keputusan seseorang untuk melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum.<sup>9</sup>

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi

beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain, seperti terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam.<sup>10</sup>

Dari kedua teori di atas jelas, bahwa migrasi disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) suatu wilayah dan faktor penarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Faktor pendorong suatu wilayah menyebabkan orang pindah ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Perpindahan penduduk ini juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Sedangkan faktor penarik suatu wilayah adalah jika wilayah tersebut mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.<sup>11</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, baik kawasan perbatasan dengan negara tetangga yang relatif lebih maju, setara, maupun yang baru terbentuk. Dalam konteks pemilihan sample, maka diambil Kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Dalam hal ini, digunakan metode *multistage purposive sampling*. Penarikan sample dengan cara ini dilakukan karena populasi yang diteliti tersebar pada wilayah yang luas.<sup>12</sup>

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka dapat ditentukan lokasi penelitian dimana wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung meliputi 5 (lima) Kabupaten yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) desa. Penekanan lokasi penelitian yang dipilih adalah skala kecamatan.

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Data

5 Bappenas, 2003, *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Laporan Studi Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hal.17.

6 Dirjend Imigrasi, 2007, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Direktorat Jenderal Migrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta, hal.23.

7 Badan Pusat Statistik, 2009, *Migrasi*. diakses pada tanggal 20 September 2009 dari situs <http://www.bps.go.id>

8 *Ibid.*

9 Todaro, M.P., 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 2, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta, hlm.37.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

12 Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. PI Grasmdo, Jakarta, hal.93-95.

melalui jalur perkawinan ini terjadi hampir di seluruh daerah perbatasan Kalbar. Perempuan Indonesia (Kalbar) yang dinikahi oleh Pria Malaysia, pada umumnya lebih memilih tinggal di Malaysia, mengikuti suaminya. Menurut Silvanus<sup>21</sup> dan Pran<sup>22</sup>, Pria Malaysia pada umumnya enggan tinggal di perbatasan Indonesia karena secara sosial ekonomi tidak menjamin keberlangsungan hidup mereka.

Selain faktor motivasi ekonomi, jalur migrasi melalui perkawinan juga dipermudah oleh sistem hukum kewarganegaraan Indonesia. Hal itu terlihat dalam ketentuan Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

"Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

Kondisi berbeda dalam sistem hukum kewarganegaraan Malaysia yang mempermudah bagi warga negara asing akan menjadi warga negara Malaysia melalui jalur perkawinan. Menurut ketentuan hukum Malaysia, seorang perempuan warga negara asing yang kawin dengan lelaki warga negara Malaysia, maka bagi yang bersangkutan dapat menjadi warga negara Malaysia dengan syarat-syarat antara lain: si perempuan tersebut mendapatkan nafkah dari suaminya yang berasal dari Malaysia; Suami perempuan tersebut lahir di Malaysia pada awal Oktober 1962; dan telah tinggal di Malaysia minimal 2 tahun.

*Kedua*, jalur migrasi penduduk dilakukan melalui jalur kelahiran. Menurut penuturan Umar Afandi<sup>23</sup> dan Yohanes,<sup>24</sup> pada awalnya proses migrasi penduduk terjadi karena proses kelahiran anak-anak penduduk perbatasan di beberapa rumah sakit yang ada di Sarawak, Malaysia. Menurut Umar, misalnya di daerah-daerah perbatasan pelayanan kesehatan sangat memprihatinkan, sehingga untuk menjaga kesehatan Ibu dan bayinya, penduduk yang akan

melahirkan lebih memilih ke Malaysia yang fasilitasnya sangat memadai dan jaraknya cukup dekat dibandingkan dengan ke Kabupaten. Dalam kasus-kasus seperti itu, pemerintah Malaysia memberikan kemudahan bagi penduduk. Tetapi dalam kasus-kasus sakit biasa, maka pelayanan yang diberikan oleh petugas medis Malaysia, bagi penduduk perbatasan Indonesia dilakukan dengan syarat memberikan jaminan antara 45-300 RM. Tanpa memberikan jaminan tersebut, maka meskipun penduduk perbatasan sakit keras tidak akan dilayani.

*Ketiga*, motif ekonomi, kasus seperti ini tidak terjadi secara merata di wilayah perbatasan, hanya daerah-daerah tertentu saja, seperti di Aruk polanya terjadi melalui perkawinan, dan di Kecamatan Entikong, khususnya di Desa Suruh Tembawang yang jaraknya 64 km dari Entikong, terjadi migrasi permanen karena faktor kesenjangan ekonomi dengan Sarawak.<sup>25</sup>

Motif ekonomi dalam melakukan migrasi ke Malaysia tersebut diakui juga oleh Camat Entikong Ignatius Irianto. Menurutnya, dalam dua dekade terakhir ratusan warga Entikong hijrah menjadi warga negara Malaysia. Itu semua karena minimnya infrastruktur dan keterbelakangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.<sup>26</sup> Ketika penduduk perbatasan berniat melakukan migrasi permanen/pindah kewarganegaraan, pada umumnya mereka relatif mudah mendapatkan identitas Malaysia. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Dusun Badat Lama, Adeus Asip yang menyatakan, bahwa jumlah warganya terus berkurang karena banyak yang pindah menjadi warga negara Malaysia. Menurutnya, dalam setiap pertemuan warga sering melontarkan keinginan mereka untuk pindah ke Malaysia, karena selama ini program pembangunan pemerintah tidak sampai ke dusun.

Motif ekonomi penduduk perbatasan melakukan migrasi tersebut, relevan dengan teori migrasi yang dikemukakan oleh Todaro maupun Carling, termasuk kajian yang dilakukan oleh Kaur. Bahwa adanya ketimpangan ekonomi antara wilayah perbatasan dengan Sarawak, menjadikan penduduk di wilayah tersebut memutuskan untuk bermigrasi. Hal ini tidak terlepas dari persoalan pembangunan kawasan

21 Wawancara, 11/5/2009.

22 Wawancara, 13/11/2009.

23 Wawancara, 15/5/2009.

24 Wawancara, 13/5/2009.

25 Kompas, 13/2/2009.

26 JawaPos, 21/6/09.

pengawasan batas-batas wilayah negara, dibandingkan dengan mengandalkan TNI yang hanya berpatokan pada peta perjanjian perbatasan antara Belanda dengan Inggris pada tahun 1815, 1819, 1928. Oleh sebab itu, menurut Umar, dalam setiap kali operasi patok perbatasan masyarakat perbatasan selalu dilibatkan, sehingga mereka memahami simbol-simbol perbatasan dan juga rasa nasionalisme diantara mereka dapat tumbuh dengan kuat.

Rawannya kejahatan lintas batas yang dapat membahayakan kedaulatan NKRI, ditandai dengan semakin meningkatnya intensitas kegiatan ilegal berupa kejahatan lintas negara pada dekade terakhir ini.<sup>30</sup> Hal itu terjadi antara lain didorong oleh adanya jaringan kejahatan lintas batas yang berskala internasional. Perkembangan di sejumlah kawasan menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara telah menjadi ancaman nyata yang terorganisir.

Kejahatan lintas negara pada saat ini telah menjadi perhatian utama negara-negara di dunia, karena tidak saja dapat mengancam stabilitas negara, namun juga merupakan ancaman terhadap stabilitas kawasan dan dunia. Kejahatan ini dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-konvensional. Hal ini disebabkan karena kejahatan lintas negara dapat mengancam seluruh aspek kehidupan sosial dan ekonomi, serta pada akhirnya dapat mengancam perdamaian dan stabilitas negara, kawasan dan dunia.

## Penutup

Kebijakan hankam sebagai paradigma utama dalam pembangunan wilayah perbatasan yang telah berjalan berpuluh tahun lamanya, terbukti kurang memberikan kemajuan dibidang sosial ekonomi bagi penduduk wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan terisolirnya wilayah perbatasan dari pembangunan nasional, sehingga orientasi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk wilayah perbatasan cenderung ke negara tetangga, Sarawak-Malaysia, yang diwujudkan dengan bermigrasi, baik secara temporer maupun secara permanen.

Pola migrasi permanen yang dilakukan oleh penduduk wilayah perbatasan yang paling banyak diminati adalah melalui jalur perkawinan dan kelahiran, selebihnya melalui jalur kekerabatan dan bekerja (pekerja migran). Adapun motivasi yang mendorong penduduk wilayah perbatasan melakukan

migrasi ke Sarawak antara lain adalah faktor ekonomi dan keberlangsungan masa depan kehidupan mereka dan anak-anaknya. Hal ini merupakan sebuah pilihan keterpaksaan dilakukan oleh penduduk perbatasan—meskipun rasa nasionalisme masih ada. Namun demikian, nasionalisme penduduk wilayah perbatasan antara kalangan tua dengan kalangan muda berbeda. Kalangan muda rasa nasionalismenya sangat "rawan" tergerus oleh kemakmuran Malaysia, sehingga pola kehidupan mereka banyak terpengaruh oleh Sarawak.

Dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk di kawasan perbatasan, maka hal itu dapat berimplikasi negatif terhadap daya dukung pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, terutama dari unsur masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam desain kebijakan hankam Indonesia. Hal ini dalam jangka panjang akan memperlemah kedaulatan negara di garda depan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reorientasi paradigma pembangunan perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan berbasis sumberdaya ekonomi lokal wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Al Araf & Abbas, Anton Ali, et al, 2008, *TNI-POLRI di Masa Perubahan Politik* (Bandung : Program Magister Studi Pertahanan Institut Teknologi, Bandung).
- Aswatini, 2007, *Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Aswin, H.A. "Strategi daerah Kalimantan Barat dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan RI-Malaysia", *Makalah disampaikan pada acara Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia* yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 22 - 23 Oktober 2002 di Jakarta.
- Bappenas, 2003, *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Laporan Studi Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang

30 Lihat Departemen Luar Negeri, 2001, *Kejahatan Lintas Negara*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, hal. 23.

Thontowi, J., Sembiring, J. dan Arifin, Saru, 2008, *Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sambas: Kajian Antropologi Tentang Model Pengembangan SDM Untuk Mendukung Pembangunan Border Development Center (BDC) di Kecamatan Sajingan Besar*, Penelitian Kerjasama Antara CLDS FH Ull dengan Pemkab Sambas, Kalimantan Barat,

Todaro, M.P., 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 2, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta.

Yogaswara, Herry, "Realisasi Strategi dan Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Masalah Perbatasan", *Makalah disampaikan pada acara Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia* yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 22 - 23 Oktober 2002 di Jakarta.

- 1) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- 4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- 5) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2008 Tentang Pertahanan Negara.

primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan pada lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data berupa dokumen tertulis, baik kebijakan, perundang-undangan, MoU atau kerjasama pembangunan perbatasan. Setelah data terkumpul dan diolah, berikutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Berbagai data dan informasi tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis data menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.<sup>13</sup>

### Migrasi Penduduk Perbatasan: *Pola dan Motivasi*

Fenomena migrasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia baik yang bersifat temporer maupun permanen, yang menggunakan jalur pintu perbatasan telah berlangsung cukup lama.<sup>14</sup> Migrasi penduduk yang berlangsung sejak berpuluh tahun lamanya, tepatnya pada sekitar pertengahan abad 19, terjadi terutama dalam kelompok buruh migran. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomi yang tidak merata di kawasan tersebut.<sup>15</sup> Dalam konteks itu, kebijakan pintu perbatasan (*border gate policy*) dari masing-masing negara di kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap keleluasaan lalu lintas orang dan barang. Semakin longgar perbatasan suatu negara, maka semakin besar mobilitas barang dan orang yang melewati pintu perbatasan.<sup>16</sup>

Terkait dengan hal ini, menurut Wuryandari,<sup>17</sup> jika suatu negara menerapkan kebijakan *soft border regime* di wilayah perbatasannya, maka hal itu akan lebih mendekatkan interaksi penduduk lintas batas, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Sebaliknya, jika suatu negara menerapkan kebijakan *hard border regime* di wilayah perbatasannya, maka akan menjadikan suasana di wilayah tersebut

dominan "dikuasai" oleh militer, dan hubungan antar penduduknya sangat ketat. Biasanya negara-negara yang menerapkan kebijakan rezim perbatasannya dengan model yang kedua ini dikarenakan adanya hubungan bertetangga yang tidak harmonis dan salingcuriga.

Praktek migrasi di kawasan Asia tersebut sampai perkembangan mutakhir juga masih di dominasi oleh migrasi temporer dengan aktor utamanya para buruh migran. Adapun negara-negara pensuplai buruh migran tersebut untuk kawasan Asia Tenggara adalah Indonesia dan Filipina. Sedangkan negara-negara transit atau tujuan dari para buruh migran tersebut adalah Thailand, Malaysia dan Singapura. Negara-negara transit buruh migran tersebut umumnya membutuhkan banyak pasartenaga kerja, sementara negara-negara pensuplai tenaga buruh migran tersebut kelebihan tenaga kerja.<sup>18</sup>

Selain faktor, pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang, pemicu terjadinya migrasi ke negara-negara transit, juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara pensuplai buruh migran, dan sebaliknya di negara-negara tujuan migrasi pertumbuhan penduduknya cukup rendah, tetapi ekonominya tinggi.<sup>19</sup>

Perkembangan mutakhir yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, dari hasil penelitian ini terlihat mengalami pola yang sama dengan bentuk migrasi penduduk secara permanen ke Sarawak, Malaysia. Pada umumnya, migrasi penduduk perbatasan ke Sarawak, Malaysia dilakukan melalui tiga cara yang dominan. *Pertama*, melalui jalur perkawinan,<sup>20</sup> cara ini cukup banyak terjadi dikalangan perempuan Indonesia yang dinikahi oleh warga Malaysia. Ada yang melalui jalur kekerabatan dan juga melalui proses pengenalan ketika berinteraksi dalam pekerjaan. Kasus-kasus migrasi

<sup>13</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum. Prenada Media, Jakarta, hlm.37; Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm.86.

<sup>14</sup> Kajian akademik mengenai persoalan migrasi di kawasan Asia selama ini banyak menekankan pada persoalan buruh migran dengan pendekatan ekonomi. Beberapa penulis yang telah melakukan kajian migrasi tersebut antara lain: Ernst Spaan, Felicitas Hillmann and Ton van Naerssen, 2005, Asian Migrants and European Labour Markets: Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe; Amarjit Kaur, 2006, Managing the Border Regulation of International Labour Migration and State Policy Responses to Global Governance in Southeast Asia, Paper dipresentasikan pada acara the 16th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Wollongong 26 June - 29 June 2006; Magdalene Kong, 2007 mengenai "Transnational Migration and Work in Asia" yang dipublikasikan dalam Journal of Contemporary Asia; Feb 2007; 37,1; Academic Research Library, pg. 134;

<sup>15</sup> Lihat Amarjit Kaur, *Managing the Border Regulation of International Labour Migration and State Policy Responses to Global Governance in Southeast Asia*, Paper dipresentasikan pada acara the 16th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Wollongong 26 June-29 June 2006, hlm.2. *Ibid.* Ganewati Wuryandari, 2009, Keamanan di Perbatasan Indonesia-TimorLeste: SumberAncaman dan Kebijakan Pengelolannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta-LIPI, hlm.47.

*Op. C/f*, hlm.5-7.

*Ibid.* hlm. 8.

Hal ini menurut Laporan dari PBB sudah menjadi fenomena umum di seluruh kawasan dunia. Lihat Jorgen Cariing, 2005, *Gender dimensions of international migration*, International Peace Research Institute, Oslo, hal.11-15.

perbatasan yang sangat tertinggal di dibandingkan dengan Sarawak.<sup>27</sup>

Dalam konteks migrasi temporer sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para buruh migran dari luar perbatasan, penduduk di kawasan perbatasan melakukannya, karena faktor perbedaan upah antara di wilayah perbatasan yang hanya mencapai Rp.20.000/hari. Sedangkan di wilayah Sarawak mencapai Rp.60.000/hari, dan hal ini tidak terlepas dari nilai tukar ringgit yang lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah.

## Dampak Migrasi Penduduk Perbatasan

### a). Terhadap Regenerasi Penduduk

Berdasarkan data demografi kawasan perbatasan terlihat, bahwa kepadatan penduduk wilayah perbatasan sangatlah tidak berimbang dengan luasnya wilayah geografisnya. Rata-rata kepadatan penduduk wilayah perbatasan mencapai 8/km<sup>2</sup>, bahkan di sebagian daerah di Kabupaten Kapuas Hulu kepadatan penduduknya ada yang mencapai 1 orang/km. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi,<sup>28</sup> serta kedaulatan negara di wilayah perbatasan.

Kondisi tersebut diperparah lagi dengan semakin berkurangnya jumlah penduduk wilayah perbatasan karena melakukan migrasi ke negara tetangga, Sarawak. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat, bahwa sebagian besar kelompok migran, baik yang permanen maupun temporer berasal dari kalangan usia muda dan perempuan. Kelompok muda pada umumnya melakukan migrasi selepas pendidikan SMP dan sebagian kecil SD. Kondisi ini disebabkan tidak adanya akses pendidikan ke jenjang SMU atau kalau ada jarak tempuhnya cukup jauh. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh kawasan perbatasan, terutama di Kabupaten Sanggau tepatnya di Dusun Badat Lama Suruh Tembawang.

Pada umumnya, penduduk usia muda yang melakukan migrasi melalui dua jalur, yaitu: jaringan kekerabatan dan penggunaan surat keterangan lahir. Pada jalur pertama, penduduk usia muda selepas SD lebih memilih untuk migrasi ke Malaysia, baik karena

motivasi ekonomi dengan bekerja disana, maupun karena motif untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik bersama kerabatnya. Banyaknya migran dari kalangan muda tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan regenerasi di wilayah perbatasan. Sebab, yang tinggal di wilayah perbatasan hanya kelompok tua atau lansia yang sudah tidak produktif lagi. Hal ini diperparah lagi dengan banyaknya kelompok migran dari kalangan perempuan muda—yang sebagian melakukan migrasi karena faktor perkawinan dengan pemuda Malaysia yang akhirnya mereka merubah status kewarganegarannya menjadi warga Malaysia, mengikuti suami mereka.

### b). Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Eksistensi penduduk di wilayah perbatasan, dalam perspektif pertahanan dan keamanan selain menjadi indikator pelaksanaan kedaulatan negara di garda depan, juga sangat signifikan dalam mendukung kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,

Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Dalam konteks ini, maka keberadaan penduduk sangatlah penting untuk mendukung pertahanan negara, terutama di wilayah perbatasan negara.

Menurut Umar Afandi,<sup>29</sup> keberadaan TNI yang bertugas menjaga wilayah perbatasan sangatlah terbatas, baik dari segi kuantitas, sarana dan prasarana dan rentang waktu yang relatif pendek. Menurutnya, penduduk yang sangat paham setiap jengkal perbatasan, jauh lebih efektif jika melakukan

27 Lihat Eddy MT Sianturi dan Nafsiah, 2001, *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI*; Majalah Baliwang Dephan, Jakarta, hal.3-4. Irwan LahnisaFitra, 2005, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan-Barat-Sarawak*; Jthesis Master Teknik Sipil ITB, Bandung, hal. 1-2.

28 Uraian secara komprehensif mengenai dampak migrasi penduduk tersebut dalam sektor pembangunan dapat dibaca dalam Bhargavi Ramamurthy, 2003, *International Labour Migrants: Unsung heroes of globalisation*, SIDA, hlm. 11. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulisnya mengenai beberapa pola migrasi dan dampaknya di berbagai belahan dunia

29 Wawancara 15/5/2009. Lihat juga Departemen Hukum dan HAM RI, Melipat dari Dekat: Rancangan Peraturan Bersama Presiden, Menteri, dan Kepala Lembaga Negara, Majalah Online Hukum & HAM, Vol. 1, No.

- Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2007, *Dimensi dan Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan*. CV. Tiara Chrisandi: Pontianak.
- BPS Kabupaten Bengkayang, 2008, *Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2007*, Bengkayang.
- BPS Kabupaten Kapuas Hulu, 2009, *Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2008*, Putussibau.
- BPS Kabupaten Sambas, 2008, *Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan Kabupaten Sambas, 2003-2007*. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan BPS Kabupaten Sambas, Sambas.
- BPS Kalimantan Barat, 2009, *Kalimantan Barat Dalam Angka 2008*, Pontianak.
- Cassese, Antonio, 1995, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Dharmawan, A.H, 2008, *Isyu-Isyu Kritis Institusi Kecamatan dalam Tata Pemerintahan Daerah: Pelajaran dan Pilihan Solusi dari Enam Kabupaten Studi*, Makalah, PSP3-IPB.
- Dirjend Imigrasi, 2007, *Keimigrasian di Wilayah Perbatasan*, Direktorat Jenderal Imigrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Jakarta.
- Guo, Rongxing, 1996, *Border-Regional Economics*, Heidelberg: PhysicaVerl, Germany.
- Hamdi, Muchlis, 2002, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, *Majalah Berita Perbatasan*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia; Jakarta.
- Haryo PS, C Wahyu, *Perbatasan Kalbar: Kampung-Kampung Itu Terancam Tinggi Nama*, Kompas, 4 April 2008.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Ikhwanuddin, 2005, *Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, Kertas Kerja yang disiapkan untuk seminar di Meneg PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal, Jakarta.
- Kompas, *Menerobos Negara Untuk Menjual Hasil Pertanian*, 4 April 2008.
- Kecamatan Badau dalam Angka 2008*, Nanga Badau.
- Lahnisafitra, Irwan, 2005, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Thesis Master Teknik Sipil ITB, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Muhdad, Norman, 2002, *"Permasalahan, Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara (Studi Kasus Perbatasan RI-Malaysia)"*, *Majalah Berita Perbatasan*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Pailah, Steven Y. 2007, *Kedaulatan NKRI vs Silent Occupation*, diakses pada tanggal 4 April 2008 dari <http://images.google.co.id/imgres?imguri>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2007, *Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antarnegara Kalimantan Barat*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: Pontianak.
- Shaw, Malcolm N. 1986, *Title to Territory in Africa: International Legal Issue*, Clarendon Press, Oxford.
- ( 2003, *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sianturi, Eddy MT dan Nafsiah, 2001, *Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI*; *Majalah Balitbang Dephan*, Jakarta.
- Starke, J.G. 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, (edisi 10, Buku I), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Supiadi, Ade, 2004, *Masalah Penguasaan Tanah di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia Kaitannya dengan Security Beit: Studi Kasus di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat*, Laporan Penelitian, Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Susetyo, Hem, 2008, *Mengelola Perbatasan Indonesia-Malaysia Dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional*, Paper untuk disertakan dalam Lomba Karva Tulis Ilmiah